

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Reformasi sistim peradilan diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Desa menjadi langkah awal yang penting, meskipun implementasinya masih memerlukan upaya lebih lanjut. Di Sumatera Barat, sistem peradilan adat tetap berfungsi sebagai bagian dari kearifan lokal. Keberadaan peradilan adat ini diakui melalui peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa negara, meskipun berpedoman pada sistem hukum nasional, tetap menghormati dan mendukung sistem hukum berbasis adat. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dengan memberikan solusi yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan temuan studi ini pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

- 5.1.1 Peradilan adat nagari di Minangkabau telah menjadi bagian integral dari sejarah panjang sistem hukum di Indonesia. Sejak masa kerajaan, hukum adat sudah diabadikan dalam limbago adat yang mencerminkan tradisi hukum yang bersifat lokal namun memiliki fungsi yang universal dalam masyarakat adat. Periode penjajahan sampai kemerdekaan Indonesia, hukum adat diakui tetapi diintegrasikan secara terbatas ke dalam sistem dualisme hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat telah beradaptasi dengan berbagai konteks pemerintahan, meskipun selalu menghadapi tantangan untuk tetap eksis di bawah sistem hukum yang lebih dominan.. Regulasi modern, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, memberikan dasar hukum bagi pengakuan lembaga adat nagari. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyinkronkan hukum adat dengan hukum nasional. Peradilan adat nagari di Minangkabau memiliki potensi

besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Namun, pengakuan ini harus diiringi dengan pembentukan regulasi yang jelas, yaitu pemerintahan nagari harus memilih menjadi desa pemerintahan adat agar peran peradilan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum formal.

- 5.1.2 Sistem adat nagari di Minangkabau bersifat unik karena menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar struktur sosial. Struktur ini diperkuat dengan konsep seperti "tigo tungku sajarangan, tali tigo sapilin," yaitu keseimbangan antara adat, syarak (agama), dan negara. Dalam konteks peradilan, sistem ini memberikan peran penting kepada tokoh adat seperti penghulu, datuak pucuak, malin, manti, dan dubalang, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola konflik sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Keunikan lain adalah penerapan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," yang menyelaraskan hukum adat dengan nilai-nilai hukum Islam. Falsafah ini menjadi landasan moral dan hukum bagi masyarakat nagari di Minangkabau, memastikan bahwa adat tidak hanya dipandu oleh kebiasaan, tetapi juga oleh nilai-nilai hukum Islam. Nilai-nilai yang dimaksud sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa adalah: pertama, penghormatan dan martabat/ Hifzh al-'Ird, yaitu menjaga kehormatan individu, marwah adat, dan martabat kolektif; kedua, keadilan dan musyawarah/ Hifzh al-Nafs, yaitu mengutamakan keadilan dan musyawarah dalam menjaga keharmonisan social; ketiga, berimbang-Alua jo Patuik/ Hifzh al-Mal & Hifzh al-Nafs, yaitu keputusan berimbang yang mencerminkan keadilan material, prosedural, dan spiritual; dan keempat Restoratif Kekeluargaan/ Hifzh al-Nafs, yaitu pemulihan hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat adat. Sistem peradilan adat di Minangkabau tidak homogen, melainkan beragam sesuai dengan sistim dan konteks lokal masing-masing nagari (adat salingka nagari). Seperti nagari dengan sistim ba-pangulu; 1) Nagari Balimbiang, yang mengadopsi kelarasan Koto Piliang yang hierarkis, dengan pengambilan keputusan yang bertingkat melalui pimpinan tertinggi, yakni datuak pucuak. Struktur ini mencerminkan sistem otokrasi dengan prinsip "bajanjang naik,

batanggo turun."; 2) Nagari Sijunjung, mempraktikkan perpaduan antara sistem Koto Piliang dan Bodi Caniago. Sistem ini menggabungkan hierarki otoritas dengan musyawarah mufakat, memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan; dan 3) Nagari Taram. lebih menonjolkan sistem peradilan adat tiga lembaga utama: Kerapatan Adat Balai Koto, Kerapatan Adat Balai Tengah, dan Surau Tuo. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan cakupan berbeda dalam penyelesaian sengketa, dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*, yang mencerminkan nilai-nilai adat dan agama yang saling berinteraksi.

- 5.1.3 Untuk memperkuat peran peradilan adat sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, beberapa langkah strategis dapat diambil pengembangan model dalam studi ini: 1) Regulasi dan Pengakuan Formal. Pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini termasuk menjadikan nagari sebagai desa pemerintahan adat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari untuk mendapatkan pengakuan resmi terhadap keputusan adat dalam peradilan formal. 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya. Tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam peradilan adat harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam konteks modern. 3) Sinergi dengan Sistem Hukum Nasional. Kolaborasi antara peradilan adat dan sistem hukum nasional yang menghormati nilai-nilai lokal sekaligus mematuhi standar hukum negara. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, peradilan adat nagari dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan, efektif, dan berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang inklusif menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam di Indonesia.

5.2 Rekomendasi

- 5.2.1 Penelitian ini memerlukan kajian lanjutan untuk menguji model yang tepat dalam pengembangan konsep peradilan adat nagari untuk pemberdayaan kearifan lokal masyarakat hukum adat, mengingat studi ini masih berada pada tahap konseptual dan bersifat gagasan awal.
- 5.2.2 Dukungan dari pemerintah kabupaten serta peran para pemegang otoritas adat nagari sangat diperlukan untuk memberikan dorongan, mengingat pengembangan peradilan adat nagari berbasis pada kearifan lokal berfokus pada keterlibatan masyarakat salingka nagari. Secara praktis, Pemerintah Daerah seharusnya mendorong keberadaan nagari sebagai desa adat dengan penataan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Tim Percepatan yang dibentuk oleh Pemerintah diharapkan dapat menggali nilai-nilai adat dari setiap nagari sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten. Dengan demikian, setiap nagari akan memiliki Perda Kabupaten/Kota yang secara khusus mengatur pengakuan dan pengelolaan nagari sesuai dengan karakteristik dan tradisinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardani, N. K. (2017). Kepastian Hukum Hak Komunal Ditinjau dari Pasal 16 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Acta Comitas*, 26. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p03>
- Carlin, R. E., & Sarsfield, R. (2012). Rethinking the Rule of Law: Concepts, Measures, and Theory. *Justice System Journal*, 33(2125–130). <https://doi.org/10.1080/0098261X.2012.10768006>
- Corrin, J. (2018). Administrative law and customary law in Papua New Guinea Jennifer Corrin. *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 18(2), 123–142. <https://doi.org/10.1080/14729342.2018.1537994>
- Hukum, J., & Generalis, L. (2021). JHLG Vol.2 No.3 Hukum Adat Maret 2021 Dicky Eko Prasetyo - Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 249–273.
- Kaartinen, T. (2014). Perceptions of Justice in the Making: Rescaling of Customary Law in Post-Suharto Maluku, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15(4), 319–338. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.927521>
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>
- Rahman, F. (2018). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Perundangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 13, 321–336.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>
- Sulaiman, S., Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum

- Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- ‘Asyur, I. (n.d.). *Maqashid Syariah al-Islamiyyah*.
- A.Hasjmy. (1995). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Bulan Bintang.
- Abdurrahman (Ed.). (1987). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*.
- Al-Buti, M. S. R. (2000). *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyah*. Muassisah al-Risalah.
- Al-Kailani, A. al-R. I. (2000). *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: Ardan wa Dirasatan wa Tahliilan*. Dar al-Fikr.
- Al-Khin, M. S. (n.d.). *Althar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1973). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Musthafa al-Babiy al-Halabiy.
- Al-Qalyuby, A. ibn A. (1998). *Hasyiyah al-Qalyuby wa ‘Amirah, juz 4*. Dar al-Fikr.
- Al-Qhattan, M. K. (1976). *At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*. Maktabah Wahbah.
- Al-Salam, I. ibn A. (n.d.). *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Juz 1*. al-Istiqamat.
- Al-Syarbini, M. ibn A. (1998). *al-Iqna’ fi hilli Alfadzi Abi Syuja’ Hasyiyah, juz 2*. Dar alKutub al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi. (n.d.). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah (III)*. Mustafa Muhamamd.
- Al-Tufi, N., & An-Nawaiyah, S. al-H. A. (n.d.). *al-Maslahat fi at Tasyri’i al-Islami wa Najmuddin al-Tufi*. Dar Al-Fikr al-Arabi.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Allah, A. al-Q. ibn H. (2007). *Dawabit I’tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi*. Maktabah al-Rushd.
- Anas, M. ibn. (n.d.). *al-Muwatha*. Daru al Fikri.
- As-Shiddieqy, M. H. (1978). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Bulan Bintang.

- As-Shiddiqi, H. (1964). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. alMa"arif.
- Ash-Shiddiqy, M. H. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Ashur, I. (1979). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyat wa Makarimiha*. al-Maktabah al-Tunisiyah.
- Ashur, I. (2003). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Daru al Makrifah.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Mizan Pustaka.
- Bahri, S. (2010). *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*. Total Media.
- Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia.
- Bryan, R. (1987). The State and Institutionalisation of Capital: Approach To Analysis. *Journal of Contemporary Asia*, 17(3), 257–258.
- Budiardjo, M. (1997). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Erlangga.
- Busroh, A. D. (2010). *Ilmu Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale Universitas Press.
- Dahl, R. A. (2006). *A. Preface to Democratic Theory, Expanded Edition*. The University of Chicago Press.
- Depdikbud. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers.
- Eriyanto. (2003). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Foucault, M. (1979). *Displine and Punish: The Berth of the Prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *The History of Sexuality*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1997). *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Gramedia.
- Friedrick, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory on Politics*. Mc-Graw Hill Book Company.
- Gidden, A., & Held, D. (1987). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Rajawali Press.

- Gramsci, A. (1971). *Selection From Prison Notebooks. Edition and translated by Quentin Hoare and Geoffrey N. Smith*. Lawrence and Wishart.
- Hanafi, A. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Heywood, A. (1997). *Politic*. Macmillan Press Ltd.
- Heywood, A. (2004). *Political Theory: An Introduction (III)*. Palgrave Macmillan Ltd.
- Honrby, A. (1986). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Isharyanto. (2016). Ilmu Negara. In A. Widyawati (Ed.), *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). Oase Pustaka.
- Jun, Z. (2002). Decentralism of the Contemporary Unitary System in China. *Hebei Legal Science*, 1, 14.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, K. (n.d.). *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Balai Pustaka.
- Kosim. (2012). Fiqih Peradilan. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). Diandra Press.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. Whittlesey House.
- Lei, W. (1997). Legal Definition of Unitary System in China. *Review of China and Foreign Law*, 6, 52–53.
- Lubis, A. Y. (2014). *Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Madkur, M. S. (1993). *Al-Qadla fi al-Islam, terj. Imran*. Bina Ilmu.
- Mahmoud Syaltout, Syeih Bustami, A. G., & Bahry, J. (1976). *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah - Islam dan Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*. Bulan Bintang.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Negara. In *BPFH UNNES*. BPFH UNNES.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mutawali, M. (2017). Epistemologi hukum islam dan sistem peradilan dalam

- islam. *Jurnal Schemata*, Vol. 6(No. 2), 149.
- Muzamil, M., & Mashdurohatun, A. (2014). Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam). In *Madina Semarang* (Issue 1). Madina.
- Neal, A. W. (2013). "Michel Foucault." dalam Edkins, Jenny & Nick Vaughan Williams (ed). *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Pasla, B. N. (2023). *Teori Terbentuknya Negara*.
- Qardlawi, Y. (2003). *Membumikan Syariat Islam*. Mizan.
- Riker, W. (2002). *Beyond the Fiction of the Federalism*. World Politic.
- Ritzer, G. (2010). *Teori Sosial Postmodern*. Juxtapose research and publication study club.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosadi, A. (2018). *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sabon, M. B. (2014). *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Atma Jaya.
- Sano, Q. (2003). *Qiraat Ma'rifiyyat fi al-Afkar al-Ushuli* (I). Dar alTajdid.
- Schacht, J. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. University Press.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30742/juisspol.v1i1.1560>
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan*. Pustaka Reka Cipta.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>
- Syalabi, A. (1997). *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (III). al-Husna Zikra.
- Syarf, M. Y. ibn. (1994). *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz 9. Dar alFikr.
- Syarifuddin, A. (1992). *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*", dalam *Falsafah Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat

Bahasa.

- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group.
- Wahid, A. (2018). Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2), 219–230. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. PT Hidakarya Agung.
- Yusdani. (2007). Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi. *Al-Mawarid*, XVII.
- Yusuf, A. al-M. A. al-M. ibn A. ibn. (1997). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs* (I). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Zhenchao, Z. (2008). Model and Enlightenment of Coordinating Central and Local relationship in the Typical Unitary States. *Guangxi Social Science*, 10, 183–184.
- Zuhdi, M. (1987). *Pengantar Hukum Syariah*. Haji Mas Agung.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. G. (1989). *Educational Research: An Introduction, Fifth Edition*. Longman.
- Jonathan Sarwono. (2013). *Strategi Melakukan Riset*. ANDI.
- Klaus A Ziegert. (2005). *Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research* (Reza Banakar & Max Travers (ed.)). Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
- Ahmad, S. D., Asrun, M., & Rosyidi, A. R. (2021). *Sejarah Peradilan Indonesia*. Penerbit IPB Press.
- Aiz, M. (2010). Konstelasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Penjajahan. *Maslahah*, 1(1), 64–73.
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Anggraini, W., & Safira, N. (2019). Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah. *Jurnal Tatapamong*.

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press.
- Assiddiqie, J. (2017). Cita Ketuhanan dalam Hukum di Indonesia dan Nisbah Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 14(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no4.1046>
- Dupret, B. (2022). *The Concept of Positive Law and Its Relationship to Religion and Morality*. In m.-C. Foblets, m. goodale, m. sapignoli, & o. Zenker. Oxford University Press Inc.
- Ernawam, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Fawaid, I., & Rahman, A. (2022). Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 129–144. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2202>
- Gavrielides, T. (2015). Repositioning Restorative Justice in Europe. *Victims and Offenders*, 11(1), 71–86. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1105342>
- Harwati, T. M. (2014). Hukum & peradilan di indonesia. In *Hukum & Politik*.
- I Wayan Gde Wiryawan, Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 169–178.
- Irianto, S. (2013). Competition and Interaction Between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 36(49), 91–112. <https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574>
- Ismail, F. (2022). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Proceedings of International Conference on Islamic Studies*, 433–444.
- Jamin, M. (2014). *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum (Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua)*. Graha Ilmu.
- Mansur, T. M., & Jalil, F. (2013). Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602-2009. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(59), 65–80.
- Mulyadi, M. (2024). The Concept of Positive Law and Its Relationship to Religion and Morality. In m.-C. Foblets, m. goodale, m. sapignoli, & o. Zenker. *Cogent Social Sciences*, 10(1).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>

- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal 17*, 5(September), 16–31.
- Nurkasihani. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat. *Pelaihari*.
- Nursadi, H. (2008). *Sistem Hukum Indonesia* (Syamsir (ed.); II). Universitas Terbuka.
- Rahman, I. N., Triningsih, A., W, A. H., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi RI*, 7.
- Rahmi, I., & Rizarnizarli. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(April), 11–20.
- Raliby, O. (1980). *Aceh, Sejarah dan Kebudayaan dalam Ismail Suny (Peny.), Bunga Rampai Tentang Aceh*. Bhratara Karya Aksara.
- Rasta, D. M. (n.d.). *Fungsi Awig-Awig dalam Mengatur Krama Desa Pakraman di Bali*. 1–17.
- Rasyidin. (2020). The Social Political Role Of Muslim Scholars (Ulamas) In The Acehnese Society. *Journal of Global Responsibility*.
<https://doi.org/10.1108/JGR-10-2018-0040>
- Reumi, F. (2023). Manakar Pengakuan, perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. *Amanna Gappa*, 28(2), 64–76.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Adat*. Madza Media.
- Sudantra, I. K., & Sukerti, N. N. (2014). Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 310–326.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i02.p06>
- Sudantra, I. K., & Windia, W. P. (n.d.). *Sesana Prajuru Desa: Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*. Udayana University Press.
- Sulastriyono. (2014). Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 90(September-Desember), 91–108.

- Vollenhoven, V. (1981). *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrecht)*, terj. Koninklijk Instituut voor Tall. Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI.
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Faisal, T. (2023). Heliyon Legal Effectiveness in Promoting Development Policies : A Case Study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*, 9(11), e21280. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>
- Wijaya, M. H., & Sutrisni, K. (2018). How Can The Existence of Costumary Las Protect The Water Preservation in the Cau Belayu (Tabanan) Traditional Village? *Yustisia*, 7(3), 600–613.
- Wiratraman, H. P. (2018). Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 488. <https://doi.org/10.22146/jmh.38241>
- Yayasan Bali Galang, Y. B. G. (2000). *Tri Hita Karana dalam Agama Hindu*. Tafsir Agama Hindu.
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Aiz, M. (2010). Konstelasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Penjajahan. *Maslahah*, 1(1), 64–73.
- Alamsyah, F. N. (2021). Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama. In *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18464>
- Anshori, T. (2020). Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>
- Antonius Padua Naicea, Rudepel Petrus Leo, & Deddy R. Ch. Manafe. (2024). Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 31–41. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i4.3962>
- Aprianti & Kasmawanti. (2016). *Hukum Adat di Indonesia*.

- Ardiansyah, M., & Azima, R. (2023). APPLICATION OF CUSTOMARY LAW IN THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(1), 245–259. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248>
- Atajaya, I. W. E., & Anom, I. G. N. (2002). Rekonseptualisasi Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat yang Berdasarkan Tri Hita Karana. *Hukum*, 12(2).
- Atwoli, J. S., & Machariah, L. W. (2023). The Judicial Approach Is The Longest Approach To Conflict Management In Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(4). <https://doi.org/10.29322/IJSRP.13.04.2023.p13634>
- Azwar, W., Muliono, M., Permatasari, Y., Akmal, H., Ibrar, S., & Melisa, M. (2019). Nagari Customary Justice System in West Sumatra. *Jurnal Bina Praja*, 21, 53–62. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.53-62>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, F. (2017). Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6450>
- Emanuel, V. (2020). KEWENANGAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 3(2). <https://doi.org/10.51826/.v3i2.244>
- Fatlolon, C. (2024). Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 43–70. <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.282>
- Faturochman. (1999). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, 2(2), 121.
- Fawaid, I., & Rahman, A. (2022). Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 129–

144. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2202>
- Fisher, R., & Ury, W. (1961). Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving in. In *Penguin Books*. (Vol. 11, Issue 6). <https://doi.org/10.1007/BF01698385>
- Fisol, W. N. M., Radzi, N. Z. M., & Othman, Y. (2017). The Engineering of Islamic Legal Opinion (IJTIHAD) on the Maqasid Al-Shari‘Ah Development in the Assessment of Islamic Financial Products. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i4/2904>
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology*. BasicBooks. <https://doi.org/10.1525/ae.1985.12.3.02a00160>
- Gunawan, R. C., & Effida, D. Q. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 139–150. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2064>
- Idrah, M. C., Nuraini, N., & Ambarini, S. N. (2021). HUBUNGAN HUKUM PIDANA ADAT DAN FILSAFAT HUKUM. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 218. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.292>
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Khodijah Ishak. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - Desember*, 3(2), 820–834.
- Mitrofanov, I. (2023). The place and significance of the judicial system in the law enforcement policy of the state. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(74), 137–142. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.56>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(1).

<https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972>

- Pablo, J. (2024). Effectiveness of Mediation and Arbitration as Alternative Dispute Resolution Methods in Mexico. *Journal of Conflict Management*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.47604/jcm.2383>
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92–111. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>
- Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.250>
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140–161.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Sistem-sistem Penguasaan dan Pengelolaan Hutan. *Jurnal Wacana*, 16(33), 3–23.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. In *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* (Vol. 7, Issue 2, pp. 198–217). Institut Agama Islam Negeri Bone. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Suhermi. (2024). Restorative Justice in Customary Law: Alternative Dispute Resolution in Indigenous Communities. *Journal of Adat Recht*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.62872/nt54cz73>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Suratno, U., Utama, A. S., Dewi, S., HM, M., & Wantu, H. M. (2024). The Role of Mediation and Arbitration in Civil Dispute Resolution. *Pena Justisia:*

- Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 869.
<https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4745>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Tarique, K. M., Islam, R., & Mohammed, M. O. (2021). Developing and validating the components of Maqasid al-Shari'ah -based performance measurement model for Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 366–390.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432>
- Ternando, A., Alfarisi, M. ., & Rahman, R. (2023). Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 204. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>
- Tsurayya Istiqamah, D. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226.
<https://doi.org/10.25123/vej.2914>
- Tyler, T. R. (2001). *Why People Obey the Law: Experimental Evidence from the Provision of Public Goods* (Issue December). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.5860/choice.28-1807>
- Widjaja, G. (2024). Managing Legal Disputes Through Alternative Disputes Resolution. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 451–460.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3347>
- Zozulya, Y. (2024). Justice as a means of ensuring of the rule of law principle implementation. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 5, 83–87.
<https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.12>